

STAKEHOLDERS DALAM PENDIDIKAN

Sundari

Mahasiswa Universitas Dharmawangsa Medan
Jl. Rawe IV Lingk. VI Martubung, Medan
Email: dsun9660@gmail.com

Tiara Eka Pharama

Mahasiswa Universitas Dharmawangsa Medan
Jl. Sehati Gg. Sabar, Medan
Email: tiaraekapharama26@gmail.com

Abstrak: Pendidikan merupakan hal terpenting dalam mencetak generasi penerus masa depan untuk kemajuan di negara Indonesia melalui sebuah keilmuan yang telah didapatkan. Kehidupan manusia tidak terpisahkan dengan lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan tersebut meliputi lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Ketiganya saling berhubungan erat untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu. Pendidikan merupakan proses kehidupan yang kompleks dan ada sepanjang manusia hidup di dunia. Dalam manajemen pendidikan juga berhubungan erat dengan stakeholder Pendidikan dalam meningkatkan mutu suatu pendidikan. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui definisi tentang manajemen lingkungan pendidikan dan manajemen stakeholder, mengetahui peran manajemen lingkungan dan manajemen Stakeholder dalam pendidikan

Kata kunci: *Stakeholders dalam Pendidikan*

PENDAHULUAN

Keberhasilan dan Tanggung jawab pendidikan pada suatu bangsa bukan hanya tugas pemerintah pusat saja tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tetapi juga tanggung jawab semua stakeholder pendidikan, pemerintah bertanggung jawab dengan mengeluarkan regulasi atau aturan yang dibutuhkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan pendidikan, selanjutnya pendidikan juga menjadi tanggung jawab Beberapa pihak yaitu pihak sekolah, orangtua, dan masyarakat atau instansi intansi terkait yang berkepentingan (Ruji'ah, Maemunah Sa'diyah, 2021)

Stakeholder di dalam lembaga Sekolah berbentuk organisasi yang disebut komite sekolah, adapun tugas komite sekolah yaitu: 1) kebijakan dan program sekolah, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Sekolah/ Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/ RKAS); kriteria kinerja sekolah; kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan kriteria kerja sama sekolah dengan pihak lain, 2) menggalang dana dan sumber dana pendidikan lainnya dari masyarakat, baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri, maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif, 3) mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah, sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan, 4) menindaklanjuti, keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat, serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016).

LANDASAN TEORI

Pendidikan adalah proses kehidupan yang masalahnya sangat kompleks dan tetap ada sepanjang manusia membentuk peradabannya di muka bumi ini. Namun dalam prosesnya pendidikan tetap memerlukan pembenahan sesuai masalah yang dihadapi pada zamannya. (Sholihuddin, 2020) Dari beberapa masalah yang ada dalam persoalan pendidikan nasional yang dapat dipelajari dalam sebuah konsep pemikiran atau setidaknya menjadi acuan dalam mengatasi berbagai anomali dalam bidang pendidikan, antara lain diantaranya: penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. (Kusnan, 2020) Penguatan tata kelola pendidikan tidak saja bergantung pada kemampuan pemerintah saja tetapi juga sangat bergantung pada kemauan dari semua lapisan masyarakat sebagai stakeholder dalam Sistem Pendidikan Nasional, oleh sebab itu dalam pengelolaan pendidikan sebagai sebagai suatu sistem sangat berkait dengan proses dan dinamika manusia dan lingkungannya (filsafatnya), dan cita-cita pendidikan harus kita lihat secara komprehensif sebagai suatu sistem pendidikan nasional yaitu adanya interdependensi komponen stakeholder pendidikan. (As'ad & Firmansyah, 2022)

A. Pengertian Stakeholder

Stakeholder pada awalnya digunakan dalam dunia usaha, istilah ini berasal dari bahasa inggris terdiri atas dua kata; *stake* dan *holder*. *Stake* berarti *to give support to*, *holder* berarti pemegang. Jadi stakeholder adalah siapapun yang memiliki kepentingan dari sebuah usaha. (Tia Aulia, 2014, dalam Muhammad Tholut, 2018). Stakeholder dapat berfungsi sebagai "tokoh kunci" atau "*key person*" dan merupakan orang yang menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya.

Definisi lain dari stakeholder adalah pemegang atau pemangku kepentingan. Orang per orang atau kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan apapun terhadap sebuah objek disebut stakeholder (Pamadi Wibowo, 2008, dalam Muhammad Tholut, 2018).

Beberapa definisi yang pending dikemukakan (Muhammad Tholut, 2018), yaitu:

- (a) Freeman (1984) yang mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.
- (b) Biset (1998) secara singkat mendefinisikan stakeholder merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Stakeholder ini sering di identifikasikan dengan suatu dasar tertentu sebagaimana di kemukakan Freeman (1984), yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relative stakeholder terhadap isu, Grimble and Wellard (1996), dari segi posisi penting dan pengaruh yang di miliki mereka.
- (c) Stakeholder adalah kelembagaan yang di anjurkan di bentuk untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan, dan komite sekolah.

Stakeholder menurut Merriam-Webster Dictionary memiliki dua makna, makna yang pertama seseorang yang dipercaya sepenuhnya. Makna yang kedua orang yang terlibat atau dipengaruhi oleh suatu tindakan.(Fahmi, 2021) Menurut Hatry *stakeholder* adalah salah satu kategori masyarakat sekolah, yang merupakan unsur-unsur sekolah yang jika salah satu unsur tersebut tidak ada, maka proses persekolahan tersebut menjadi terganggu. Definisi ini lebih diperjelas dalam kamus Manajemen Mutu, stakeholder adalah kelompok atau individu di dalam atau luar organisasi yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi oleh pencapaian misi, tujuan dan strategi organisasi biasanya terdiri atas pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemerintah dan peraturannya.(Suharti, 2021)

B. Stakeholder dalam Pendidikan

Stakeholder pendidikan dapat di artikan sebagai orang yang menjadi pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan, stakeholder adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan

pendidikan di sekolah, karena pada dasarnya stakeholder dalam pendidikan itu sendiri dibagi dalam tiga kategori utama (Muhammad Tholut, 2018), yaitu:

- 1) Sekolah, termasuk di dalamnya adalah para guru, kepala sekolah, murid dan tata usaha sekolah.
- 2) Pemerintah diwakili oleh para pengawas, penilik, dinas pendidikan, walikota, sampai menteri pendidikan nasional
- 3) Masyarakat, sedangkan masyarakat yang berkepentingan dengan pendidikan adalah orangtua murid, pengamat dan lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan atau badan yang membutuhkan tenaga pendidik, took buku, kontraktor pembangunan sekolah, penerbit buku, penyedia alat pendidikan, dan lain-lain.

Stakeholder dalam pendidikan islam adalah berbagai pihak yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan sukses tidaknya proses pendidikan yang berlangsung. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah kepala sekolah, guru, wali murid, pemerintah, para tokoh dn masyarakat (Muhammad Tholut, 2018) Berdasarkan kekuatan, posisi penting dan pengaruh stakeholder terhadap suatu isu, stakeholder dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok, yaitu stakeholder primer, stakeholder sekunder dan stakeholder kunci (Tia Aulia, 2014 dalam Muhammad Tholut, 2018).

a) Stakeholder utama (primer)

Stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. (Ali Hanafiah et al., 2021) Contohnya, masyarakat dan tokoh masyarakat, masyarakat yang terkait dengan proyek, yakni masyarakat yang di identifikasika akan memperoleh manfaat dan yang akan terkena dampak (kehilangan tanh dan krmungkinan kehilangan mata pencaharian) dari proyek ini. Sedangkan tokoh masyarakat adalah anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan di wilayah itu sekaligus dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat. Di sisi lain, stakeholders utama adlah juga pihak manajer public yakni lembaga/ badan public yang bertanggung jawab dalam pengambilan dan implementasi suatu keputusan.(Asda, 2022)

b) Stakeholder pendukung (sekunder)

Stakeholder pendukung adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (concern) dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. (Sobri et al., 2022) Yang termasuk stakeholder pendukung (sekunder) adalah seperti lembaga pemerintah (aparatur) dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung, lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat yang bergerak sesuai dengan concern atau fokus dari LSM tersebut, perguruan tinggi yakni kelompok akademis ini memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah. (Kharismah & Silalahi, 2021)

c) Stakeholder kunci

Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislative dan instansi. Stakeholder kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten. Yang termasuk dalam stakeholder kunci termasuk: pemerintah kabupaten, DPRD kabupaten, dan dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan. (Furqan et al., 2021)

C. Pemetaan Stakeholder Dalam Pendidikan

Unsur paling penting yang perlu diketahui sejak awal oleh manajer sebuah organisasi adalah berkaitan dengan pertanyaan siapa yang menjadi stakeholder organisasi ini. Untuk mengetahui siapa stakeholder sekolah/madrasah, manajer harus mengenal berbagai bentuk dan mutu layanan serta produk yang dihasilkan oleh sekolah/madrasah tersebut. (Fahmi, 2021) Para pendiri dan penerus organisasi harus mengetahui dengan pasti untuk apa organisasi ini ada. Berbagai bentuk dan mutu layanan dan produk yang dihasilkan oleh sekolah/madrasah tersebut akan memengaruhi stakeholder dari sekolah/madrasah tersebut. Perubahan mutu layanan dan produk yang dihasilkan oleh sekolah/madrasah tertentu akan dapat mengubah stakeholder sekolah/madrasah tersebut. (Nur Kholis, Zamroni, 2014)

Jika melihat dari beberapa pembagian stakeholder di lembaga pendidikan, maka akan dikenal stakeholder primer, sekunder, dan tertier. Stakeholder utama sekolah/madrasah adalah siswa, namun demikian siswa datang ke sekolah/madrasah karena adanya pembiayaan

dari orang tua siswa, sehingga kedua komponen tersebut merupakan komponen yang paling harus diperhatikan oleh sekolah/madrasah.(Siregar, 2022)

Untuk mengidentifikasi stakeholder potensial dapat dilakukan dengan mengajukan berbagai pertanyaan, misalnya orang tua dengan tingkat ekonomi yang bagaimana? Orang tua muslim yang memiliki aliran apa? Orang tua muslim yang tinggal dimana? Orang tua muslim yang menginginkan anaknya memiliki kecakapan apa setelah lulus? Dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian sekurangnya akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan stakeholder potensial dari madrasah ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya harus digunakan metode yang tepat. Misalnya dengan metode survei.(Muhaimin, 2010,hal.137) Stakeholder pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang monadic pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Stakeholder pendidikan dibagi dalam 3 kategori utama, yaitu:

- 1) Sekolah, termasuk di dalamnya adalah para guru, kepala sekolah, murid dan tata usaha sekolah.Seperti yang kita tahu, di dalam sekolah terdapat berbagai pihak diantaranya kepala sekolah, pendidik, dan peserta didik. Kepala sekolah bertanggung jawab pada perkembangan prestasi peserta didiknya, suasana lingkungan kerja guru, dan karakter keseluruhan sekolah. Kepala sekolah juga memegang peranan penting lain yaitu penghubung antara guru, orang tua, dan para stakeholder lainnya. Peserta didik di masa globalisasi semakin membuat mereka beragam dengan kehadiran teknologi sebagai tempat-tempat belajar informal mereka (internet, media sosial, dll). Guru sebagai elemen kunci utama pendidikan semakin dituntut untuk beradaptasi dan bertanggung jawab atas hal-hal yang dialami peserta didik.
- 2) Pemerintah, diwakili oleh para pengawas, pemilik, dinas pendidikan, walikota, sampai menteri pendidikan nasional. Pemerintah, selaku pembuat kebijakan juga harus bersinergi dengan stakeholder lain. Peran pembuat kebijakan yaitu pelayan mediator antara aktor-aktor pendidikan lainnya, baik di tingkat daerah hingga pusat. Yang mana, setiap kebijakan yang mereka putuskan diharapkan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh stakeholder pendidikan lain serta mendukung kinerja antar stakeholder.

- 3) Masyarakat, sedangkan masyarakat yang berkepentingan dengan pendidikan adalah orang tua murid, pengamat dan ahli pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan atau badan yang membutuhkan tenaga terdidik, toko buku, kontraktor pembangunan sekolah, penerbit buku, penyedia alat pendidikan, dan lain-lain
- 4) Berbeda dengan stakeholder sekolah dan pemerintah yang terlibat langsung dalam sistem pendidikan, masyarakat termasuk dalam bagian diluar lingkaran sistem pendidikan tetapi berkaitan secara tidak langsung pada aktor pendidikan didalamnya. Perbedaan ini penting untuk diketahui bahwa masyarakat, stakeholder eksternal pendidikan, tidak mempunyai kapasitas yang lebih besar dari sekolah dan pemerintah dalam menghasilkan perubahan pendidikan.

D. Penetapan Stakeholder Sekolah/Madrasah

Penetapan stakeholder potensial dari lembaga pendidikan merupakan proses yang sangat penting dalam manajemen lembaga. Kesalahan dalam menentukan stakeholder potensial tersebut akan berdampak pada kesalahan dalam proses manajemen selanjutnya yang pada akhirnya akan menimbulkan tidak terserapnya produk dan layanan lembaga pendidikan di masyarakat.

Sebagaimana terlihat dari hasil pemetaan stakeholder di atas, kegiatan yang dihasilkan dari pemetaan tersebut menghasilkan berbagai harapan dari berbagai kelompok stakeholder. Masing-masing harapan dari kelompok stakeholder tersebut dimungkinkan memiliki perbedaan yang kontras antara satu kelompok stakeholder dengan kelompok stakeholder yang lain. Oleh karenanya tidak mungkin semua harapan dan kebutuhan kelompok stakeholder tersebut dipenuhi oleh lembaga pendidikan. Itulah sebabnya lembaga pendidikan harus memilih kelompok stakeholder yang akan dipenuhi harapan dan kebutuhannya.[6]

Proses memilih kelompok stakeholder yang akan menjadi sasaran untuk dilakukan pemenuhan kebutuhan dan harapan tersebut itulah yang disebut dengan proses menetapkan stakeholder potensial. Dalam proses pemilihan ini tentu saja sekolah/madrasah harus juga menyesuaikan dengan kondisi internal lembaga saat ini dan yang akan datang, sehingga apa yang diinginkan dan diharapkan oleh stakeholder tersebut akan dapat dipenuhi oleh lembaga. Itulah sebabnya sebelum dilakukan analisis, lembaga pendidikan harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya yang ada di lembaga tersebut.

Hasil pemetaan sumber daya tersebut kemudian digunakan untuk melakukan analisis dalam menentukan stakeholder utama dari lembaga pendidikan. Proses analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan antara sumber daya yang ada di lembaga pendidikan dan proyeksinya empat tahun ke depan dan kebutuhan dan harapan stakeholder. Dalam menentukan stakeholder potensial lembaga pendidikan digunakan perbandingan antara kemampuan pemenuhan sumber daya di lembaga pendidikan sampai dengan empat tahun ke depan dengan tingkat kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan dan harapan stakeholder. Semakin tinggi tingkat kesesuaian tersebut, maka akan semakin potensial pula stakeholder tersebut bagi lembaga pendidikan.[*ibid*, hlm. 144-148)

Selain menggunakan analisis, proses penentuan stakeholder potensial juga harus memperhitungkan latar belakang dan hal-hal yang menjadi dasar dalam pendirian lembaga pendidikan tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang dan dasar pendirian lembaga tersebut tidak dapat dianalisis dengan menggunakan logika, namun biasanya diketahui secara jelas oleh pendiri atau pimpinan lembaga.

Dengan mendasarkan pada stakeholder potensial lembaga dan berbagai landasan filosofis lembaga inilah kemudian kegiatan utama lembaga pendidikan dapat ditentukan. Walaupun secara garis besar kegiatan utama sekolah/madrasah adalah pendidikan dan pengajaran, namun dalam proses pelaksanaannya terdapat berbagai variasi yang merupakan perwujudan dari keinginan dan harapan dari stakeholder potensial.

Berbagai bentuk pembelajaran dalam mata pelajaran muatan lokal atau berbagai jenis pelayanan dalam proses pendidikan dan pengajaran serta penunjangnya merupakan beberapa contoh yang dapat dilihat jika hendak mengidentifikasi stakeholder potensial lembaga pendidikan. Sekolah/madrasah yang memiliki stakeholder potensial dari tingkat ekonomi menengah ke atas misalnya akan melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai bantuan teknologi, setiap kelas dibimbing oleh beberapa guru, kegiatan pembelajaran kontekstual dapat dilaksanakan dengan baik, pembimbingan anak dengan menggunakan teori belajar konstruktivis dapat dilaksanakan, dan berbagai bentuk layanan pendidikan lainnya dapat dengan mudah untuk dilaksanakan. Sedangkan madrasah yang terletak di daerah dengan banyak pondok pesantren dengan stakeholder utamanya berasal dari

santri pondok pesantren akan melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran yang sangat terkait dengan berbagai pelajaran yang ada di pondok pesantren tersebut dan kegiatan-kegiatan yang sangat terkait dengan pondok pesantren.[*ibid*, hlm. 144-148)

E. Mengelola Stakeholder Sekolah/Madrasah

Satuan pendidikan (sekolah) yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat akan selalu menghadapi tekanan, baik yang berasal dari luar institusi sekolah maupun dari dalam. Namun demikian, unsur-unsur tersebut tidak selalu menekan sekolah, adakalanya unsur-unsur tersebut malah memberikan peluang yang justru akan meningkatkan mutu sekolah. Tugas sekolah membina hubungan yang baik dengan pihak-pihak tersebut melalui suatu proses komunikasi. Pihak-pihak tersebut adalah khalayak sasaran kegiatan sekolah yang disebut stakeholder yaitu setiap kelompok yang berada di dalam maupun diluar institusi sekolah yang mempunyai peran menentukan peningkatan mutu sekolah. Stakeholder terdiri atas berbagai kelompok penekan (*pressure group*) yang mesti dipertimbangkan oleh sekolah. Dalam kerangka yang lebih luas, kepuasan kelompok-kelompok dalam stakeholder dapat dipakai sebagai indikator keberhasilan sekolah.

Secara umum stakeholder sekolah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder internal relatif mudah untuk dikendalikan dan pekerjaan untuk komunikasi interen bisa diserahkan pada bagian lain seperti wakil kepala sekolah atau dirangkap langsung oleh kepala sekolah. Ketika iklim demokrasi dan pemberdayaan tumbuh dengan baik di Indonesia, muncullah persaingan antar sekolah sejenis tidak hanya mengangkat calon-calon peserta didik terbaik atau mempertahankannya, tetapi juga mencari dan mempertahankan manajer sekolah, guru, dan tenaga kependidikan serta karyawannya yang sudah teruji mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas sekolah.

Sedangkan stakeholder eksternal adalah unsur-unsur yang berada di luar kendali sekolah (*uncontrollable*). Peserta didik dan orang tua peserta didik sebagai konsumen sekolah adalah raja yang mempunyai hak untuk memilih layanan belajarnya sendiri. Peserta didik dan orang tua peserta didik banyak diperebutkan oleh sekolah, sedikit sekali sekolah yang bisa membujuk pemerintah untuk menerbitkan peraturan yang menguntungkan sekolah.

Para pimpinan sekolah umumnya dibekali dengan teknik untuk mendesain organisasinya sesuai dengan keadaan lingkungan eksternalnya. Unsur dalam lingkungan eksternal itu dapat dilihat dari (1) kompleksitas lingkungannya, yaitu diukur dari banyaknya pihak luar institusi sekolah yang perlu mendapat perhatian sekolah karena pengaruhnya. Semakin banyak aktor yang perlu diperhatikan, maka semakin kompleks hal-hal yang dihadapi, tetapi jika semakin sedikit aktor yang perlu diperhatikan, maka urusannya semakin sederhana; (2) stabilitas lingkungan, yaitu diukur dari perubahan, bila terlalu sering terjadi perubahan peraturan pemerintah dan kebijakan pemerintah terhadap sekolah, perubahan selera konsumen, perubahan peran aktor dalam lingkungan lainnya, maka lingkungan dikatakan tidak stabil (labil), keadaan sebaliknya disebut stabil.[Syaiful, 2003,hlm:257-259)

KESIMPULAN

Dalam pemetaan stakeholder sekolah memiliki 2 cara dalam mengidentifikasi stakeholder, yaitu analisi dan survei. Hasil pemetaan sumber daya tersebut kemudian digunakan untuk melakukan analisis dalam menentukan stakeholder utama dari lembaga pendidikan. Dalam mengelola hubungan sekolah dengan stakeholder agar tetap baik harus dengan melalui suatu proses komunikasi. Pihak-pihak tersebut adalah khalayak sasaran kegiatan sekolah yang disebut stakeholder yaitu setiap kelompok yang berada di dalam maupun diluar institusi sekolah yang mempunyai peran menentukan peningkatan mutu sekolah

Stakeholder pendidikan dapat di artikan sebagai orang yang menjadi pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan, stakeholder adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah, karena pada dasarnya stakeholder dalam pendidikan itu sendiri dibagi dalam tiga kategori utama (Muhammad Tholut, 2018), yaitu: 1) Sekolah, termasuk di dalamnya adalah para guru, kepala sekolah, murid dan tata usaha sekolah; 2) Pemerintah diwakili oleh para pengawas, penilik, dinas pendidikan, walikota, sampai menteri pendidikan nasional; 3) Masyarakat, sedangkan masyarakat yang berkepentingan dengan pendidikan adalah orangtua murid, pengamat dan lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan atau badan yang membutuhkan tenaga pendidik, took buku, kontraktor

pembangunan sekolah, penerbit buku, penyedia alat pendidikan, dan lain-lain Dalam pemetaan stakeholder sekolah memiliki 2 cara dalam mengidentifikasi stakeholder, yaitu analisis dan survei. Hasil pemetaan sumber daya tersebut kemudian digunakan untuk melakukan analisis dalam menentukan stakeholder utama dari lembaga pendidikan.

Dalam mengelola hubungan sekolah dengan stakeholder agar tetap baik harus dengan melalui suatu proses komunikasi. Pihak-pihak tersebut adalah khalayak sasaran kegiatan sekolah yang disebut stakeholder yaitu setiap kelompok yang berada di dalam maupun diluar institusi sekolah yang mempunyai peran menentukan peningkatan mutu sekolah

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hanafiah, M., Syafri, A., Ardina Hasibuan, M., Wardhana Salamony, F., & Fuadi Fauzi, A. (2021). Efektivitas Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Siantar. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 137-146. <https://journal.yaspim.org/index.php/pendalas/article/view/78>
- As'ad, A., & Firmansyah, F. (2022). A New Paradigm on Human Resources Management in State Islamic University. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 71-84. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1513>
- Asda, Y. (2022). Efektivitas Pembelajaran Model Kooperatif Tipe Jigsaw Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Sejarah Kebudayaan Islam Pada Siswa *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan ...*, 2(3), 160-175. <https://journal.yaspim.org/index.php/pendalas/article/view/129>
<https://journal.yaspim.org/index.php/pendalas/article/download/129/102>
- Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, (Jakarta:Kencana, 2004).
- Fahmi, F. (2021). Standar Proses dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Sekolah. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-16.
- Furqan, M., Sakdiah, & Keumangan, T. (2021). PENDIDIKAN ISLAM MENURUT KH. HASYIM ASY'ARI (Analisis Kritis Kode Etik Murid Terhadap Guru). *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 147-173. <https://journal.yaspim.org/index.php/pendalas/article/view/78>

- 9%0Ahttps://journal.yaspim.org/index.php/pendalas/article/download/79/59
- Kompri, Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Muhaimin, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: kencana, 2010)
- Muhaimin, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Kharismah, N., & Silalahi, B. R. (2021). Berbasis Nilai-Nilai Kepedulian Untuk Pembelajaran Membaca Siswa Kelas Iii a Sd Negeri 106836 Limau Manis. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat Vol.*, 1(3), 209–216.
- Kusnan. (2020). PLURALISM RECONSTRUCTION. *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 2(1), 47–61. <https://doi.org/10.47006/ijierm.v2i1.31>
- Nur Kholis, Zamroni, S. (2014). MUTU SEKOLAH DAN BUDAYA PARTISIPASI STAKEHOLDERS SCHOOL QUALITY AND PARTICIPATION CULTURE OF THE STAKEHOLDERS. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(2), 130–142.
- Sholihuddin, M. (2020). Internalization of Principal Curriculum Management in Primary School and Madrasah Ibtidaiyah. *International Journal of Islamic Education* <https://journal.yaspim.org/index.php/IJIERM/article/view/118>
%0Ahttps://journal.yaspim.org/index.php/IJIERM/article/download/118/94
- Siregar, A. N. (2022). *PANDANGAN FILOSOFIS TENTANG PERILAKU BULLYING PADA SISWA DI SEKOLAH*. 2(3), 215–228.
- Sobri, M., Daud, S. M., & Vahlepi, S. (2022). Pelatihan Guru Agama Berbasis Literasi Digital Kependidikan Di Mts Al-Ihsaniyah Sarang Burung Muaro Jambi. *PENDALAS: Jurnal Penelitian ...*, 2(3), 204–214. <https://journal.yaspim.org/index.php/pendalas/article/view/160>
%0Ahttps://journal.yaspim.org/index.php/pendalas/article/download/160/110
- Suharti, D. (2021). Penerapan Metode Demonstrasi Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas Xi Smk Negeri 1 Balikpapan Tahun Pelajaran 2019 *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan ...*, 1(1), 44–91. <https://journal.yaspim.org/index.php/pendalas/article/view/64>
- Syaiful, Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2003)